**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan manajemen dan profesionalisme pengelolaan perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penyesuaian kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembar Negara Nomor 10 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 Tahun 1999);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.690-154 tahun 1996 tentang Klasifikasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Sistem Karier Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Negera Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Milik Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
- h. Istri/suami adalah istri/suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang lainnya;
- k. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- l. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
- m. Daftar penilaian pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi;

- n. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari sekolah negeri atau swasta yang statusnya disamakan;
- o. Peraturan Perusahaan ialah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi;
- p. Tenaga honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan sistem kerja jangka pendek;
- q. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.

BAB II
BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN
PERUSAHAAN, LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama
Bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Lampung Selatan yang didirikan dengan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 1987 ditetapkan kembali bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Selatan dengan nama **“PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN“**.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota kabupaten

Bagian Kedua
Tujuan Perusahaan

Pasal 3

- (1) Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka menunjang program pembangunan daerah;
- (2) Memberikan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat secara adil, merata dan secara terus-menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Ketiga
Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Membangun, memelihara, dan menjalankan usaha penyediaan air minum;
- (2) Menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
- (3) Menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
- (4) Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur;

BAB III M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Modal dasar tersebut pada ayat (1) dapat ditambah dari anggaran keuangan daerah, penyetoran modal dan pinjaman dari pihak ketiga;
- (3) Pinjaman dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- (4) Semua alat likuidasi disimpan dalam Bank pemerintah yang ditunjuk.

BAB IV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 6

- (1) Cadangan diam dan rahasia tidak diperkenankan;
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dana pembangunan Daerah sebesar 55 %;
 - b. Cadangan umum, sosial, pendidikan, jasa produksi, pensiun, sebesar 45 %,
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana tercapai tujuan, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan maksud memupuk dan meningkatkan pembangunan perusahaan selanjutnya;
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana cadangan dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Bupati.

BAB V TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 7

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Air Minum adalah Tahun Takwin;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan Laba/Rugi Laporan Arus Kas Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (3) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan memberikan pembebasantanggung jawab kepada Direksi;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum kepada Badan Pengawas;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaaa Air Minum yang diajukan maka rencana kerja dan anggaran perusahaan, dianggap telah disahkan.

BAB VI PENGURUS

Pasal 8

Pengurus Perusahaan Air Minum terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati, diutamakan bukan dari PNS atas usul Badan Pengawas;
- (2) Dalam hal calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perusahaan Daerah Air Minum;
 - d. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
 - e. batas usia pada saat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. tidak terikat hubungan kerja dengan Bupati atau Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 10

Jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan penggolongan tipe Perusahaan Daerah Air Minum paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di perusahaan daerah yang sama;
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat sebagai Direktur Utama;
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun;